



Penguatan Tata Kelola Potensi Lokal Berbasis Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke

Syahrabudin Husein Enala¹, Frederikus Antonius Mana², Aenal Fuad Adam³

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the strengthening of community-based governance of local coastal potential in supporting sustainable development in Merauke Regency. The coastal area of Merauke possesses diverse local potentials, including capture fisheries, aquaculture, mangrove ecosystems, wetlands, and indigenous local wisdom. However, these resources have not been optimally and sustainably managed. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical research design. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, field observations, and document analysis of coastal development policies and programs. Data analysis was conducted using an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that weak inter-agency coordination, sectoral policy approaches, and limited community participation in development planning are major factors hindering effective governance of local coastal potential. Although coastal communities possess strong social capital and indigenous knowledge, their roles have not been fully integrated into formal policy frameworks. This study emphasizes the importance of implementing structured community-based collaborative governance as a strategic approach to strengthening coastal resource governance, promoting sustainable coastal development, and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) at the local level.

Keywords: governance; local potential; coastal communities

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan tata kelola potensi lokal berbasis masyarakat pesisir dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke. Kawasan pesisir Merauke memiliki potensi lokal yang beragam, meliputi sumber daya perikanan, ekosistem mangrove, lahan basah, serta kearifan lokal masyarakat adat, namun pemanfaatannya belum terkendali secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan program pembangunan pesisir. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi, pendekatan sektoral dalam kebijakan, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas tata kelola potensi lokal pesisir. Meskipun masyarakat pesisir memiliki modal sosial dan kearifan lokal yang kuat, peran mereka belum terintegrasi secara optimal dalam sistem kebijakan formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan collaborative governance berbasis masyarakat sebagai strategi penguatan tata kelola potensi lokal pesisir untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Kata Kunci: tata Kelola; potensi local; masyarakat pesisir

¹ CONTACT: syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id

DOI: <https://10.35724/mjpa.v8i1.6600>

© 2025 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC- BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).x

1. Pendahuluan

Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena kekayaan sumber daya alam, modal sosial, serta potensi ekonomi yang dimilikinya. Kawasan ini menjadi ruang hidup bagi jutaan masyarakat yang bergantung langsung pada keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut,

seperti perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, serta ekosistem pendukung seperti mangrove dan lahan basah. Dalam konteks pembangunan nasional, wilayah pesisir berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian lingkungan, sekaligus menjadi wilayah yang rentan terhadap degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial apabila tidak dikelola secara berkelanjutan (Adnyawati, 2023).

Di Indonesia, pembangunan wilayah pesisir memiliki keterkaitan langsung dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Beberapa tujuan SDGs yang relevan dengan pembangunan pesisir antara lain SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDGs 14 (Ekosistem Laut), serta SDGs 16 (Kelembagaan yang Tangguh dan Inklusif). Pencapaian tujuan-tujuan tersebut mensyaratkan adanya tata kelola sumber daya pesisir yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai aktor pembangunan, khususnya masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama.

Kabupaten Merauke sebagai wilayah pesisir di kawasan timur Indonesia memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan, mangrove, lahan basah, serta kekayaan kearifan lokal masyarakat pesisir dan adat yang telah lama menjadi dasar pengelolaan ruang hidup secara tradisional. Potensi lokal tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Merauke masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait lemahnya tata kelola, keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal, serta belum optimalnya integrasi kebijakan pembangunan (Jalal & Enala, 2025).

Penelitian Enala dan Mana (2025) juga menegaskan bahwa pemanfaatan potensi lokal di kawasan pesisir Kampung Matara belum sepenuhnya mampu mendorong pencapaian SDGs secara optimal karena masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam kerangka tata kelola pembangunan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan potensi lokal saja tidak cukup, tetapi memerlukan sistem tata kelola yang mampu mengorganisasi, mengoordinasikan, dan mengarahkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan pesisir sangat dipengaruhi oleh pendekatan tata kelola (*governance*) yang digunakan. Penelitian oleh **Alfiandri, Prasojo, dan Malik (2024)** menunjukkan bahwa pendekatan *collaborative governance* merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan karena mampu mendorong koordinasi antaraktor, memperkuat partisipasi masyarakat lokal, serta meningkatkan legitimasi kebijakan pengelolaan pesisir. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pendekatan *collaborative governance* juga banyak digunakan dalam studi pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Penelitian oleh Rozikin et al. (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), serta memperkuat modal sosial di tingkat lokal. Melalui mekanisme kolaboratif, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan aktor utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Meskipun demikian, literatur juga mengungkapkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif di kawasan pesisir masih menghadapi berbagai hambatan. Studi mengenai pengelolaan ekowisata mangrove di Tanjungpinang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi horizontal antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta rendahnya kapasitas kelembagaan lokal menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan (Siyardi, Samin, & Akhyary, 2024).

Dalam konteks Merauke dan wilayah pesisir Papua Selatan, tantangan tata kelola juga diperberat oleh kuatnya struktur sosial dan sistem kepemimpinan adat. Penelitian Jalal dan Enala (2025) tentang kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum menunjukkan bahwa pengelolaan ruang hidup masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan otoritas adat. Namun, sistem ini sering kali belum terintegrasi secara formal dalam kebijakan pembangunan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara praktik lokal dan kebijakan publik.

Berbagai literatur juga mengusulkan model pembangunan berbasis potensi lokal dan kearifan lokal sebagai pendekatan alternatif untuk mendorong pembangunan pesisir berkelanjutan. Model *Blue Villages* misalnya, menekankan pentingnya integrasi antara pemanfaatan potensi lokal, praktik sosial masyarakat, dan kerangka pembangunan berorientasi SDGs. Pendekatan ini dipandang mampu mendorong transformasi wilayah pesisir menjadi desa berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sosial (Kunyati et al., 2024).

Kajian lain dalam konteks ekonomi kreatif digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan potensi lokal pesisir. Enala et al (2025) menegaskan bahwa integrasi teknologi digital dengan kearifan lokal berpotensi memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan secara komprehensif dimensi tata kelola, peran masyarakat pesisir, dan pencapaian SDGs dalam satu kerangka analisis. Kajian yang secara spesifik membahas penguatan tata kelola potensi lokal berbasis masyarakat pesisir di wilayah pesisir kawasan timur Indonesia, khususnya Kabupaten Merauke, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih kontekstual dan holistik.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penguatan tata kelola potensi lokal berbasis masyarakat pesisir dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan

kerangka teori tata kelola (*governance theory*), pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*), serta SDGs sebagai kerangka normatif pembangunan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut dalam konteks empiris wilayah pesisir Papua Selatan. Oleh karena itu, identifikasi masalah yang tepat dan perumusan tujuan penelitian yang jelas menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Merauke.

2. Literatur Review

2.1 Tata Kelola Pembangunan Pesisir Berkelanjutan

Kajian mengenai pembangunan pesisir berkelanjutan menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan pesisir sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola (*governance*) yang diterapkan. Tata kelola pembangunan pesisir mencakup regulasi, koordinasi antaraktor, transparansi pengambilan keputusan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan (Adnyawati, 2023). Pembangunan pesisir yang tidak berbasis tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, ketimpangan ekonomi, serta konflik sosial yang menghambat keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, tantangan tata kelola pesisir semakin kompleks akibat tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sumber daya pesisir cenderung sektoral dan berorientasi jangka pendek. Sejumlah studi menegaskan bahwa pendekatan tata kelola top-down tidak lagi efektif dalam menjawab kompleksitas permasalahan pesisir, sehingga diperlukan pendekatan tata kelola yang lebih adaptif, partisipatif, dan kontekstual (Adnyawati, 2023).

2.2 Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir

Pendekatan collaborative governance berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan tata kelola konvensional dalam pengelolaan sumber daya publik. Pendekatan ini menekankan keterlibatan berbagai aktor—pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil—dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan setara. Penelitian Alfiandri, Prasojo, dan Malik (2024) menunjukkan bahwa collaborative governance efektif dalam pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan karena mampu meningkatkan koordinasi antaraktor serta memperkuat partisipasi masyarakat lokal. Studi lain yang dilakukan oleh Rozikin et al. (2022) memperlihatkan bahwa collaborative governance mampu meningkatkan inklusivitas pembangunan, memperkuat modal sosial, serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan pesisir. Melalui kolaborasi, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Namun demikian, implementasi collaborative governance tidak selalu berjalan optimal. Penelitian Siyardi, Samin, dan Akhyary (2024) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi horizontal, ketidakjelasan pembagian peran aktor, serta rendahnya kapasitas kelembagaan lokal menjadi hambatan utama dalam praktik kolaborasi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat bergantung pada konteks lokal dan kesiapan institusional.

2.3 Peran Masyarakat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Pesisir

Literatur pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal merupakan prasyarat utama keberlanjutan pembangunan, khususnya di kawasan pesisir. Masyarakat pesisir memiliki pengetahuan lokal dan praktik tradisional yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jalal dan Enala (2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan adat dan kearifan lokal Suku Kanum di Merauke berperan signifikan dalam pengelolaan ruang hidup masyarakat adat, meskipun belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan formal. Dalam konteks Kabupaten Merauke, Enala dan Mana (2025) menemukan bahwa pemanfaatan potensi lokal pesisir belum optimal dalam mendorong pencapaian SDGs akibat lemahnya integrasi antara peran masyarakat, kelembagaan lokal, dan kebijakan pembangunan daerah. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola berbasis masyarakat sebagai strategi pembangunan pesisir berkelanjutan.

2.4 Model Pembangunan Berbasis Potensi Lokal dan SDGs

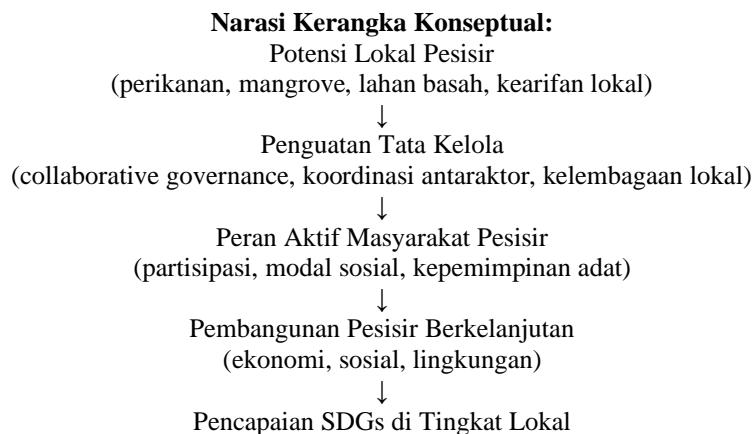
Sejumlah literatur mengusulkan model pembangunan berbasis potensi lokal sebagai pendekatan holistik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Model *Blue Villages* yang dikembangkan oleh Kunyati et al. (2024) menekankan integrasi antara potensi lokal, praktik sosial masyarakat, dan kerangka SDGs. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan pesisir tidak dapat dicapai melalui intervensi sektoral semata, tetapi memerlukan tata kelola terpadu yang menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kajian mengenai ekonomi kreatif digital di wilayah 3T menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal, seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), berperan strategis dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir. Enala et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi teknologi digital dengan kearifan lokal mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mendukung transformasi pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pesisir berkelanjutan membutuhkan tata kelola kolaboratif, partisipasi aktif masyarakat, serta integrasi potensi lokal dalam kerangka SDGs. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara komprehensif, khususnya dalam konteks wilayah pesisir kawasan timur Indonesia seperti Kabupaten Merauke (Enala & Mana, 2025).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *knowledge gap* yang menuntut pengembangan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan hubungan antara tata kelola, peran masyarakat pesisir, dan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan kerangka teoretis yang memadukan governance theory, community-based development, dan perspektif SDGs.

Kerangka Konseptual Penelitian (Diagram Naratif)

Berdasarkan sintesis literature review, penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa pembangunan pesisir berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui pemanfaatan sumber daya, tetapi memerlukan tata kelola yang kuat, partisipasi masyarakat, dan integrasi potensi lokal dalam kerangka SDGs (Kunyati et al., 2024; Enala, 2025).



Penelitian ini memadukan **governance theory**, **community-based development**, dan **SDGs** sebagai kerangka teoretis utama (Leedy & Ormrod, 2005). Teori tata kelola menekankan pengelolaan sumber daya publik melalui jejaring aktor yang kolaboratif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pesisir, collaborative governance relevan untuk menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Alfiandri et al., 2024; Rozikin et al., 2022). Teori Community-Based Development adalah Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan menekankan partisipasi, modal sosial, dan kearifan lokal sebagai fondasi keberlanjutan (Jalal & Enala, 2025). Teori Sustainable Development Goals (SDGs) atau SDGs digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penguatan tata kelola potensi lokal pesisir (Kunyati et al., 2024; Enala & Mana, 2025). Berdasarkan kajian literatur dan kerangka teoretis yang telah diuraikan, pembangunan pesisir berkelanjutan memerlukan penguatan tata kelola potensi lokal berbasis partisipasi aktif masyarakat pesisir serta integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, pemahaman empiris mengenai praktik tata kelola tersebut di tingkat lokal, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam praktik penguatan tata kelola potensi lokal berbasis masyarakat pesisir melalui pendekatan metodologis yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan konteks wilayah penelitian.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji penguatan tata kelola potensi lokal berbasis masyarakat pesisir dalam mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan di Kabupaten Merauke. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada praktik tata kelola, partisipasi masyarakat, interaksi kelembagaan, serta dinamika sosial yang memerlukan pemahaman kontekstual dan interpretatif, bukan pengukuran kuantitatif semata. Penelitian dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang dipilih secara purposif karena memiliki potensi sumber daya lokal yang besar, seperti perikanan, ekosistem mangrove, lahan basah, dan kearifan lokal masyarakat adat, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola dan keberlanjutan pembangunan. Karakteristik tersebut menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji isu tata kelola pesisir di kawasan timur Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang meliputi aparat pemerintah daerah, pemerintah kampung, tokoh adat, serta masyarakat pesisir untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik pengelolaan potensi lokal dan peran para aktor yang terlibat. Observasi lapangan digunakan untuk melihat secara langsung kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kawasan pesisir, sementara studi dokumentasi digunakan untuk menelaah kebijakan, program, dan publikasi yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori tata kelola, pembangunan berbasis masyarakat, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode. Pendekatan metodologis yang bersifat deskriptif ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sekaligus mendukung pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

4. Hasil & Pembahasan

4.1 Potensi Lokal Pesisir di Kabupaten Merauke

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan pesisir Kabupaten Merauke memiliki potensi lokal yang sangat beragam dan strategis, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun ekologis. Potensi tersebut meliputi sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, ekosistem mangrove yang luas, lahan basah (wetlands), serta kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola ruang hidup dan sumber daya alam. Secara ekonomi, sektor perikanan dan sumber daya pesisir lainnya menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat pesisir, sementara secara sosial, praktik pengelolaan tradisional mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan keberlanjutan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal tersebut masih bersifat tradisional dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Aktivitas ekonomi masyarakat pesisir cenderung berjalan dalam skala kecil dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Selain itu, belum terdapat strategi pembangunan pesisir yang secara eksplisit mengaitkan pemanfaatan potensi lokal dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kondisi ini sejalan dengan temuan Enala dan Mana (2025) yang menyatakan bahwa potensi lokal pesisir di Merauke belum dikapitalisasi secara optimal akibat keterbatasan tata kelola, lemahnya dukungan kelembagaan, serta minimnya integrasi kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, potensi lokal yang besar belum sepenuhnya mampu bertransformasi menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2 Praktik Tata Kelola Potensi Lokal Pesisir

Dari sisi tata kelola, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan potensi lokal pesisir di Kabupaten Merauke masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan administratif. Program-program pembangunan pesisir dijalankan oleh berbagai perangkat daerah secara terpisah sesuai dengan kewenangan masing-masing, tanpa koordinasi yang kuat dan berkelanjutan. Akibatnya, banyak program yang bersifat jangka pendek, tumpang tindih, dan tidak saling memperkuat satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pesisir masih berorientasi pada logika birokratis, bukan pada pendekatan kolaboratif yang berpusat pada kebutuhan dan potensi masyarakat.

Selain itu, mekanisme kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan non-pemerintah belum dilembagakan secara formal. Kolaborasi yang terjadi cenderung bersifat ad hoc, bergantung pada proyek atau program tertentu, serta belum diikuti dengan kejelasan peran dan tanggung jawab antaraktor. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Siyardi et al. (2024) yang menegaskan bahwa lemahnya koordinasi horizontal antarinstansi serta ketidakjelasan peran aktor merupakan hambatan utama dalam implementasi collaborative governance di kawasan pesisir. Dengan demikian, persoalan utama tata kelola pesisir di Merauke tidak terletak pada ketidadaan kebijakan, melainkan pada lemahnya integrasi dan implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal.

4.3 Peran dan Partisipasi Masyarakat Pesisir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Kabupaten Merauke memiliki modal sosial dan kearifan lokal yang relatif kuat, terutama yang terwujud dalam sistem kepemimpinan adat dan praktik pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Nilai-nilai adat dan norma lokal berperan penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak keseimbangan ekosistem pesisir. Dalam konteks ini, masyarakat pesisir sejatinya memiliki kapasitas sosial dan budaya yang memadai untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan masih tergolong terbatas. Masyarakat umumnya dilibatkan pada tahap pelaksanaan program, seperti sebagai penerima bantuan atau pelaksana kegiatan, tetapi jarang dilibatkan secara bermakna dalam tahap perumusan kebijakan dan perencanaan strategis. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya pendekatan top-down dalam pembangunan pesisir. Temuan ini sejalan dengan Jalal dan Enala (2025) yang menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan adat di Merauke memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan formal pemerintah daerah. Ketidakterhubungan antara sistem adat dan kebijakan formal ini menyebabkan kearifan lokal belum berfungsi secara maksimal sebagai instrumen tata kelola pembangunan.

4.4 Penguatan Tata Kelola Berbasis Collaborative Governance

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola potensi lokal pesisir di Kabupaten Merauke membutuhkan pendekatan collaborative governance yang lebih terstruktur dan kontekstual. Collaborative governance dipandang sebagai mekanisme yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat pesisir, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang kompleks. Kolaborasi antaraktor berpotensi meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi lokal apabila didukung oleh kejelasan peran, mekanisme koordinasi yang kuat, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Alfiandri et al. (2024) yang menegaskan bahwa collaborative governance mampu meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan pesisir melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Rozikin et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap program pembangunan, sehingga meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan. Dalam konteks Merauke, penguatan collaborative governance perlu disesuaikan

dengan karakteristik lokal, khususnya dengan mengintegrasikan peran kepemimpinan adat dan kelembagaan komunitas ke dalam sistem tata kelola formal.

4.5 Implikasi terhadap Pembangunan Pesisir Berkelanjutan dan SDGs

Implikasi utama dari temuan penelitian ini adalah bahwa lemahnya tata kelola dan terbatasnya partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci yang menghambat pencapaian pembangunan pesisir berkelanjutan dan SDGs di Kabupaten Merauke. Penguatan tata kelola potensi lokal berbasis masyarakat berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap berbagai dimensi pembangunan. Dari sisi ekonomi, pengelolaan potensi lokal yang lebih terkoordinasi dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dari sisi sosial, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial dan legitimasi kebijakan pembangunan. Sementara itu, dari sisi lingkungan, tata kelola yang inklusif dan berbasis komunitas dapat mendukung perlindungan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Temuan ini memperkuat model pembangunan berbasis potensi lokal yang dikemukakan oleh Kunyati et al. (2024), yang menekankan integrasi antara potensi lokal, praktik sosial masyarakat, dan kerangka SDGs. Selain itu, perspektif integrasi kelembagaan lokal dan inovasi yang dikemukakan oleh Enala (2025) juga relevan dalam memperluas strategi pembangunan pesisir, khususnya dalam konteks wilayah 3T. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kegagalan pembangunan pesisir berkelanjutan di Kabupaten Merauke bukan disebabkan oleh ketiadaan potensi lokal, melainkan oleh lemahnya tata kelola, minimnya kolaborasi antaraktor, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam sistem kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola potensi lokal berbasis masyarakat pesisir merupakan strategi kunci untuk mendorong pembangunan pesisir berkelanjutan dan pencapaian SDGs di tingkat lokal.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan pesisir berkelanjutan di Kabupaten Merauke tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan potensi sumber daya lokal, tetapi sangat bergantung pada kekuatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan peran masyarakat pesisir, kelembagaan lokal, dan kebijakan pembangunan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat pemanfaatan potensi lokal secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya pengakuan terhadap kearifan lokal masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan pesisir. Oleh karena itu, penguatan tata kelola potensi lokal berbasis masyarakat pesisir menjadi strategi kunci untuk mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan kontekstual, khususnya di wilayah pesisir kawasan timur Indonesia seperti Kabupaten Merauke.

6. Daftar Pustaka

- [1] Adnyawati, N. D. (2023). Tata kelola pembangunan pariwisata pesisir berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. *Bali Tourism Journal*, 7(1), 45–56.
- [2] Alfandi, A., Prasojo, E., & Malik, A. (2024). Collaborative governance dalam pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 15(2), 123–138.
- [3] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [4] Enala, S. H. (2025). Kearifan lokal dan ekonomi kreatif digital di daerah 3T: Studi awal tentang potensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(3), 276–284.
- [5] Enala, S. H., & Mana, F. A. (2025). Pemanfaatan potensi lokal untuk mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di kawasan pesisir: Studi kasus Kampung Matara, Kabupaten Merauke. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(4), 265–272.
- [6] Jalal, N., & Enala, S. H. (2025). Kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(3), 267–275.
- [7] Kunyati, S., et al. (2024). Blue villages: Local potential-based sustainable coastal community development model. *EnPress Journals*, 5(1), 1–12.
- [8] Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2005). *Practical research: Planning and design* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- [9] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [10] Perry, C., Riege, A., & Brown, L. (2003). Realism's role among scientific paradigms in marketing research. *European Journal of Marketing*, 33(3/4), 660–671.
- [11] Rozikin, M., et al. (2022). Collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. *International Journal of Research in Social Sciences*, 12(4), 89–101.
- [12] Siyardi, S., Samin, R., & Akhyary, E. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata mangrove di kawasan pesisir Tanjungpinang. *Jayapangus Press Journal*, 8(2), 201–214.